

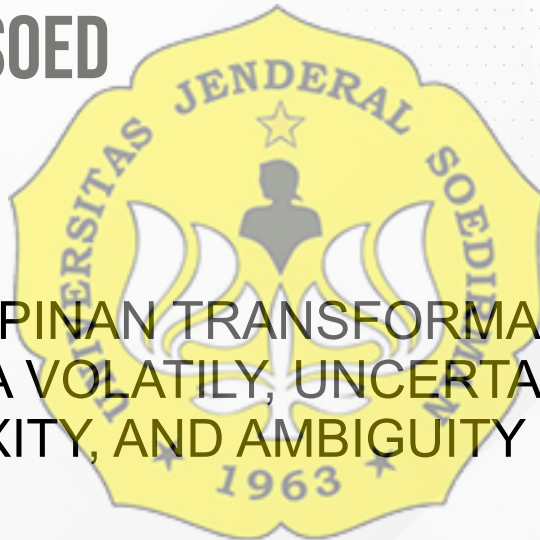
ISBN: 978-623-465-038-9

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

◆ JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FISIP UNSOED

◆ KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL
PADA ERA VOLATILY, UNCERTAINTY,
COMPLEXITY, AND AMBIGUITY
(VUCA)



GEDUNG AUDITORIUM FISIP UNSOED
17 JULI 2022



Penerbit
Universitas Jenderal Soedirman
2022

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FISIP UNSOED**

**KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PADA ERA
VOLATILITY, UNCERTAINTY, COMPLEXITY AND
AMBIGUITY (VUCA)**



Penerbit
Universitas Jenderal Soedirman
2022

Prosiding

Seminar Nasional Jurusan Administrasi Publik FISIP Unsoed “KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL PADA ERA VOLATILITY, UNCERTAINTY, COMPLEXITY AND AMBIGUITY (VUCA)”

Buku Elektronik Kesatu, Agustus 2022
Hak Cipta dilindungi Undang-undang
All Right Reserved

STREERING COMMITTEE :

1. Dr. Wahyuningrat
2. Dr. Tobirin

ORGANIZING COMMITTEE :

1. Dr. Dyah Retna Puspita
2. Lilis Sri Sulistiani, M.M.
3. Dr. Slamet Rosyadi
4. Dr. Denok Kurniasih
5. Dr. Hikmah Nuraeni
6. Sendy Noviko, M.Si.
7. Shadu Satwika Wijaya, M.Si

REVIEWER:

1. Dr. Slamet Rosyadi
2. Shadu Satwika Wijaya, M.Si

EDITOR:

1. Dr. Hikmah Nuraeni
2. Dr. Tri Yumarni
3. Dr. Delly Maulana



Penerbit:

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

Gd. BPU Percetakan dan Penerbitan (UNSOED Press)

Telp. (0281) 626070

Email: unsoedpresspwt@gmail.com

v + 177 hal., 21 x 29,7 cm

ISBN: 978-623-465-038-9 (PDF)

Dilarang memperbanyak tanpa ijin tertulis dari penerbit, sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun, baik cetak, photoprint, maupun microfilm.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirrabbi'l'amin, puji syukur kepada Allah SWT. berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga Seminar Nasional Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman 2022 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Seminar ini mengambil tema “Kepemimpinan Transformasional pada Era *Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity* (VUCA).

Pada pelaksanaan seminar dipresentasikan hasil penelitian, review dan hasil pengabdian yang dilakukan oleh peserta seminar yang berasal dari berbagai instansi dan perguruan tinggi lain. Hasil seminar tersebut kami dokumentasikan dalam prosiding ini.

Seminar dapat terlaksana dengan sukses atas bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah membantu terselenggaranya seminar ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan prosiding seminar nasional ini sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diperlukan. Semoga prosiding ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang memerlukan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Purwokerto, Juli 2022

KEPEMIMPINAN DAN PREMANISME DI BIROKRASI

Sukarso, Niken Paramarti Dasuki

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman

Abstrak

Konotasi pokok dari konsep kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, sedangkan kepemimpinan di birokrasi adalah peran dan otoritas formal yang diberikan kepada seseorang untuk mempengaruhi para bawahannya. Kewenangan yang dimiliki secara formal oleh birokrat selalu direalisasikan dengan berbagai cara, atau gaya, agar bawahan dapat bekerja sesuai yang diharapkan atau seharusnya. Dengan mereview beberapa konsep pokok kepemimpinan dan premanisme serta mengkaji kasus-kasus penyalahgunaan wewenang, ternyata praktek-praktek premanisme sangat potensial terjadi di birokrasi. Ada beberapa kemungkinan yang sudah diantisipasi dengan berbagai regulasi, namun kemungkinan yang lain masih belum tersentuh. Regulasi tentang anti-diskriminasi atau anti-sara, anti-korupsi, kolusi dan nepotisme, anti-penyalah-gunaan wewenang, dan anti-anti yang lain sudah diundangkan, namun anti kekerasan psikologis nampaknya belum secara eksplisit dijadikan regulasi. Oleh karena itu, potensi premanisme di birokrasi masih sangat tinggi.

Kata kunci: kepemimpinan, premanisme, kekerasan psikologis

A. Pendahuluan

Pemahaman tentang konsep kepemimpinan selama ini nampaknya relatif tetap, pertama berkonotasi positif karena hanya dengan kepemimpinan maka kerja sekelompok orang dapat lebih efisien dan efektif. Kedua, kepemimpinan bersumber pada kemampuan atau kekuasaan sebagaimana definisi sederhana dari kepemimpinan itu sendiri, yaitu kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Ketiga, kepemimpinan seringkali disamakan dengan istilah-istilah lain seperti manajer, administrator, fasilitator, atau mungkin tutor. Keempat, kepemimpinan dapat dikenali berbagai gaya atau tipe bagaimana cara-cara mempengaruhi orang lain tersebut.

Pada diskursus sosiologi, terutama era Max Weber, kepemimpinan diasosiasikan dengan dominasi, kepemimpinan adalah kemampuan orang untuk mendominasi orang lain. Dalam diskusi pada era ini dapat dibedakan antara kepemimpinan tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Pada perkembangan selanjutnya, konsep kepemimpinan ditambah dengan berbagai kata sifat yang dianggap lebih actual, seperti kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan otokratik,

kepemimpinan demokratis, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional, dan lain-lain. Meskipun demikian, nampaknya jarang didiskusikan sisi negatif dari konsep dan praktek kepemimpinan ini.

Diskursus tentang kepemimpinan dan kekuasaan sudah menjadi bidang kajian yang relatif mapan pada disiplin sosiologi, politik, hukum dan ekonomi. Sosiolog banyak menjelaskan bagaimana masyarakat berperilaku dan kepemimpinan menjadi pihak yang dianggap bertanggungjawab pada perilaku masyarakat tersebut. Ilmuwan politik banyak menjelaskan bagaimana kewenangan dimiliki oleh orang atau kelompok tertentu dan bagaimana kewenangan itu direalisasikan, kepemimpinan (elite) adalah pihak yang memiliki dan merealisasikan kewenangan tersebut. Ilmuwan hukum banyak menjelaskan bagaimana membuat regulasi dan melaksanakan regulasi tersebut, kepemimpinan adalah pihak yang membuat dan melaksanakan regulasi tersebut. Sedangkan ekonom banyak menjelaskan bagaimana sebuah organisasi (perusahaan) dapat membuat rencana dan melaksanakan rencana tersebut, kepemimpinan (manajer) adalah pihak yang membuat rencana dan menjamin pelaksanaan rencana tersebut.

Beberapa dasa terakhir diskusi tentang kepemimpinan di dalam satu organisasi formal berorientasi pada bagaimana kepemimpinan yang efektif dan efisien, banyak dikenal sebagai kepemimpinan "serba-sifat". Kepemimpinan serba sifat ini mensyaratkan bahwa untuk menjadi pemimpin (memiliki jiwa kepemimpinan) harus enerjik, pintar, antusias, ramah, jujur, tegas, percaya diri, obyektif, dan lain-lain. Pada prakteknya ternyata persyaratan tersebut seringkali tidak didukung fakta, dengan kata lain, kepemimpinan yang sukses (yang mampu mempengaruhi orang lain sesuai keinginannya) tidak selalu harus memiliki sifat-sifat tersebut. Pada akhirnya muncul beberapa "model" kepemimpinan yang dianggap sesuai dengan situasinya, misalnya kepemimpinan transformasional yang mencoba mengidentifikasi karakter kepemimpinan yang sesuai dengan proses perubahan penting dalam organisasi (transformasi).

Sementara itu, fenomena praktek kekerasan dalam masyarakat atau organisasi sudah diantisipasi oleh masyarakat itu sendiri, dibuktikan dengan aturan-aturan yang ada, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada masyarakat modern, termasuk organisasi modern, aturan-aturan tersebut sudah tertulis sehingga lebih pasti dalam penerapannya. Pada umumnya pelaku kekerasan akan diancam dengan konsekuensi hukuman yang jelas, terutama berkaitan dengan aturan kriminal atau hukum pidana. Pembuat dan penjaga peraturan tersebut *nota-bene*

para pemimpin itu sendiri, oleh karena itu menarik untuk mendiskusikan praktek-praktek kekerasan yang dilakukan oleh para pemimpin itu sendiri. Praktek-praktek kekerasan yang dimaksud di sini menunjuk pada instrumen dominasi utama para preman ketika “memaksakan” kepatuhan ke orang lain, atau premanisme. Dengan demikian, bagaimana kaitan antara kepemimpinan dan premanisme, terutama di dalam organisasi pemerintahan atau birokrasi?

B. Metode

Artikel ini ditulis berdasarkan opini penulis yang terbangun dari berbagai simpulan faktual dan berbagai penelitian tentang kekerasan di birokrasi.

C. Analisis dan Pembahasan: Premanisme Ketika Kekerasan Sebagai Instrumen

Pemahaman tentang premanisme menunjuk pada perilaku kekerasan (riil atau potensial) yang berujung pada perolehan (biasanya materi) dari satu pihak (pelaku/preman) terhadap pihak lain (korban). Terlepas dari spekulasi sejarah istilah ini, baik dari bahasa belanda (*vrijman*) maupun bahasa inggris (*freeman*), pada umumnya istilah ini dikenal dengan cara-cara kekerasan yang dipakai untuk menuntut kepatuhan pihak lain. Oleh karena itu, esensi dari premanisme beda tipis dengan istilah kepemimpinan yang disampaikan di pendahuluan di muka. Akan tetapi kepemimpinan selama ini berkonotasi positif sedangkan premanisme berkonotasi negatif.

Kasus-kasus premanisme yang sering muncul dalam berbagai media selalu menunjuk pada semacam mata pencaharian yang menggunakan kekerasan untuk mendapatkan penghasilan tertentu, dan kelakuan tersebut dianggap melanggar aturan yang ada. Dapat dengan mudah ditengarai para pelaku premanisme (dalam media tersebut) selalu pihak-pihak yang tidak masuk organisasi atau birokrasi, atau bahkan diklasifikasi sebagai “pengangguran”. Misalnya, mereka diidentifikasi sebagai pelaku “pungli” di pasar atau terminal bus atau pelabuhan atau stasiun kereta api atau lahan parkir kendaraan atau tempat-tempat lainnya (misal Nugroho dkk., 2017; Anam, 2018).

Premanisme seolah atau dikesankan sebagai “musuh” masyarakat yang harus “dibersihkan” sehingga masyarakat terdoktrin hanya pelaku-pelaku “pungli” tersebut yang harus dibersihkan dari kehidupan masyarakat karena melanggar regulasi yang ada. Bahkan sudah menjadi stigma para preman itu adalah para pelaku “pungli”, sedangkan para penjaga regulasi adalah para petugas yang

melaksanakan kewajibannya. Yang pertama konotasinya negatif dan yang kedua positif.

Regulasi anti kekerasan, dalam bentuk ancaman atau kekerasan fisik, sudah diatur dengan regulasi yang relatif tegas. Jika terbukti, sesuai dengan hukum acara, maka pelaku akan mendapatkan sanksi yang jelas. Aparat penegak hukum seperti ini sudah bekerja sesuai roh dari regulasi tersebut, barang siapa terbukti melakukan kekerasan akan mendapatkan hukuman yang sesuai dan bersifat memaksa. Oleh karena itu, pelaku premanisme adalah pihak yang salah dan penjaga regulasi tentang itu adalah pihak yang benar. Namun, jika melihat esensi dari definisinya, maka premanisme juga berhubungan dengan kekuatan untuk mempengaruhi orang lain dengan instrumen kekerasan (memaksa), baik potensial berupa ancaman maupun penganiayaan fisik yang dilakukan.

Kepemimpinan di Birokrasi: Gaya dan Jenisnya

Pembahasan tentang jenis kepemimpinan dalam birokrasi selama ini tidak lepas dari istilah dominasi satu pihak terhadap pihak lain, misalnya Max Weber, yang mengidentifikasi adanya tiga alasan mengapa satu pihak bersedia patuh kepada pihak lain, yaitu karena kebiasaan yang ada atau tradisi (kepemimpinan tradisional); karena alasan psikologis (kepemimpinan karismatik); dan karena sesuai dengan aturan yang ada atau dibuat (kepemimpinan legal rasional). Alasan yang terakhir, legal-rasional, membuat persyaratan *serba-sifat* untuk menjadi pemimpin menjadi tidak relevan. Pihak tertentu patuh kepada pihak lain bukan karena faktor pribadi (karismanya) atau keturunan (tradisinya) akan tetapi karena aturan yang dibuat atau legitimasi dari pembuat aturan tersebut. Dalam arti inilah pembahasan tentang kepemimpinan dalam birokrasi.

Demikian pula dengan gaya kepemimpinan yang diidentifikasi selama ini menunjuk pada bagaimana cara untuk mempengaruhi pihak lain, seperti partisipatif, demokratis, *laizez-faire*, transaksional, otokratik, transformasional, dan lain-lain. Di dalam birokrasi, kepemimpinan partisipatif menunjuk pada pelibatan bawahan dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut. Kepemimpinan demokratis menunjuk pada kesepakatan terhadap keputusan yang diambil pemimpin, sedangkan *laizez-faire* menunjuk pada bawahan yang diberikan kebebasan seperti tidak ada kepemimpinan dan kondisi tersebut memang diinginkan pemimpin yang bersangkutan. Kepemimpinan transaksional menunjuk

pada pemimpin yang menekankan pada sebab-akibat dari kepatuhan para bawahannya, sedangkan kepemimpinan otokratik menunjuk pada keputusan-keputusan pemimpin yang harus dilaksanakan oleh para bawahannya. Kepemimpinan transformasional menunjuk pada jenis pemimpin yang kompatibel dengan tuntutan perubahan-perubahan penting dalam organisasinya. Dari berbagai gaya dan jenis kepemimpinan tersebut, pada dasarnya kepemimpinan itu esensinya adalah bagaimana pemimpin dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan sebagaimana yang diinginkan pemimpin yang bersangkutan.

Kasus-kasus Kekerasan di Birokrasi

Birokrasi sebagai satu entitas tempat orang banyak berinteraksi tidak lepas dari terjadinya kekerasan, baik potensial maupun riil, dari seorang pemimpin terhadap para bawahannya. Sebagaimana telah disampaikan di muka, bahwa dalam masyarakat, khususnya birokrasi, telah dirumuskan berbagai regulasi yang mengatur tentang tindak kekerasan yang dilakukan di dalam birokrasi, sehingga kasus-kasus yang muncul dalam berbagai media tentang kekerasan yang terjadi di birokrasi cenderung berkaitan dengan aturan yang ada. Dengan kata lain, sepanjang tidak dilarang oleh aturan yang ada, maka tindakan yang dilakukan tidak akan dikonotasikan sebagai kekerasan.

Kasus pelecehan (biasanya seksual, misalnya Nikmatullah, 2020)) dan penganiayaan sudah umum menjadi berita, namun kekerasan dalam bentuk lain jarang menjadi berita kasus kekerasan. Berbagai berita kasus pelecehan seksual cenderung pelecehan oleh pria terhadap wanita dan jarang yang sebaliknya (lihat Supramudyo, 2007-10). Demikian pula kasus penganiayaan, seringkali dilakukan oleh pemimpin dan jarang sebaliknya pula. Meskipun regulasi yang ada tidak diskriminatif seperti itu, namun kasus-kasus kekerasan yang seringkali menjadi berita selalu dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah, bukan sebaliknya.

Beberapa kasus kekerasan yang jarang menjadi “kasus” di dalam birokrasi adalah kekerasan psikologis dalam bentuk “penghinaan” dan kesewenang-wenangan (*power abuse*). Karena temperamental seorang pemimpin atau sinikal (*sinical*) sehingga menimbulkan kemarahan atau ekspresi yang tak terkendali sampai pada penghinaan kepada para bawahannya. Kata-kata *goblog*, *blo'on*, sampah, atau yang sejenisnya, dapat saja keluar dari seorang pemimpin yang

berkonotasi pada kekerasan psikologis. Sedangkan penyalah-gunaan wewenang atau kesewenang-wenangan dapat berupa eksploitasi kepatuhan bawahan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Pemimpin dapat saja memaksa bawahannya untuk patuh atau melayani kebutuhan keluarganya, seperti anaknya atau familinya. Perilaku pemimpin terakhir dapat dikonotasikan dengan pelecehan (birokratis) terhadap para bawahannya.

Dengan demikian, kekerasan yang terjadi di dalam birokrasi dapat berupa kekerasan fisik dan pelecehan seksual pada umumnya sudah ada regulasinya. Akan tetapi kekerasan psikologis dan pelecehan birokratis sejauh ini jarang menjadi kasus, kemungkinan karena regulasi yang ada tidak tegas mengaturnya atau dianggap bukan kekerasan.

Diskusi Premanisme di Birokrasi: Agenda Riset

Dari tinjauan konseptual dan opini dari praktek-praktek kepemimpinan dan premanisme, nampak bahwa isu premanisme di dalam birokrasi cukup penting untuk dikaji. Dengan kata lain, apakah kepemimpinan dalam birokrasi yang antara lain bertugas menjaga regulasi anti-premanisme ternyata juga melakukan praktek-praktek premanisme? Dari tinjauan konseptual tentang kepemimpinan dan premanisme, sangat bisa diduga kepemimpinan dalam birokrasi juga melakukan praktek-praktek premanisme dalam bentuk kekerasan, baik yang dianggap pelanggaran regulasi maupun yang sampai saat ini dianggap bukan pelanggaran regulasi (karena belum ada regulasinya).

Sampai saat ini sangat jarang ada “kasus” yang diberitakan sebagai kasus berkaitan dengan penghinaan dan pelecehan (birokratis) yang dilakukan oleh pimpinan birokrasi terhadap para bawahannya. Dengan kata lain, dua contoh kekerasan tersebut sangat bisa diduga masih banyak terjadi dalam birokrasi. Jika dugaan ini masih sangat meragukan, dapat menjadi agenda riset yang menantang karena berpotensi untuk mengembangkan regulasi yang lebih anti-kekerasan dalam birokrasi. Berbagai berita tentang bagaimana kelompok tertentu melakukan pelecehan atau penghinaan terhadap kelompok yang lain dapat juga menjadi agenda riset untuk membuktikan bagaimana premanisme ada dalam birokrasi.

Bahkan jika terdapat regulasi, termasuk penetapan tugas-pokok-dan fungsi (tupoksi) dan analisis beban kerja, yang membenarkan penggunaan kekerasan untuk menuntut kepatuhan para bawahannya dapat dikategorikan sebagai legitimasi praktek premanisme dalam birokrasi. Untuk membuktikan opini ini dapat dilakukan

pembuktian melalui berbagai metode riset dan metode analisis. Misalnya, analisis konten dapat dilakukan untuk agenda riset kekerasan dalam regulasi, bukan hanya *judisial-review*.

D. Kesimpulan

Dari uraian konseptual tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam birokrasi esensi dari kepemimpinan adalah kemampuan untuk menuntut kepatuhan pihak lain, sedangkan premanisme adalah kemampuan untuk memaksa pihak lain mematuhi keinginannya. Beda keduanya ada pada legitimasi, kepemimpinan legal-rasional bekerja berdasarkan regulasi yang jelas, sedangkan premanisme dinilai tidak mempunyai dasar regulasi yang jelas. Persamaannya, keduanya menuntut kepatuhan dari pihak lain.

Dari perspektif faktual, instrumen atau praktek kekerasan sangat bisa diduga masih ada yang dianggap sah atau legitimate di dalam kepemimpinan birokrasi, seperti penghinaan dan pelecehan birokratis. Hal terakhir ini dapat menjadi agenda riset untuk menghasilkan regulasi yang lebih *ramah* terhadap sesama manusia, bukan sebaliknya. Dalam dimensi makro dapat membuat pemerintahan atau negara lebih *ramah* terhadap warga negaranya.

Daftar Pustaka

Nikmatullah, (2020), Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus, *QAWWAM: JOURNAL FOR GENDER MAINSTREAMING*, *ol. 14, No. 2 (2020), hal. 37-53*, doi: 10.20414/qawwam.v14i2.2875

Nugroho, Agung Satrio, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono, (2017), Tinjauan Kriminologis Tindak Premanisme Oleh Pengamen Di Simpang Lima Kota Semarang, *DIPONEGORO LAW JOURNAL* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017.

Anam, Khoirul, (2018), Tindak Pidana Dilakukan Oleh "Premanisme", *Yustitia, Volume 4, No 1 Tahun 2018*.

Supramudyo, Gitadi Tegas, 2007-10, Feminisme dan Pelecehan Seksual dalam Birokrasi Kekuasaan Pemerintahan, *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Vol. 20 / No. 4.